

PROFIL KETAHANAN PANGAN INDONESIA UNTUK AEC 2015

Meliza, Danang Satrio

meliza_zafrizal@yahoo.com/ 081517508318

Abstrak

Ketahanan pangan Indonesia menjadi isu penting saat ini. Harga bahan pangan yang semakin tinggi memicu terjadinya peningkatan impor bahan pangan. Pada sepuluh tahun terakhir terjadi peningkatan nilai impor sebanyak empat kali lipat. Selain itu, menurunnya jumlah produk pangan yang dihasilkan sektor pertanian di Indonesia menyebabkan rendahnya permintaan akan produk pangan lokal. Kurangnya peranan dan perhatian dari pemerintah menyebabkan sektor pertanian Indonesia tidak dapat bersaing baik di pasar lokal maupun internasional. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kualitas ketahanan pangan Indonesia terutama dalam menghadapi Asean Economic Community 2015. Faktor lain yang mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia yaitu semakin sempitnya lahan pertanian menyebabkan hasil pertanian yang dihasilkan semakin menurun kuantitasnya. Oleh karena itu, saat ini baik pemerintah dan sektor swasta harus meningkatkan peranan dan perhatiannya di sektor pertanian. Semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas pangan yang dihasilkan oleh sektor pertanian Indonesia dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Profil Ketahanan Pangan Indonesia untuk AEC 2015

Asean Economic Community (AEC) yang akan diwujudkan tahun 2015 merupakan sebuah kesepakatan ekonomi negara-negara di ASEAN yang memiliki komitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan dasar produksi internasional, kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, pengembangan ekonomi yang merata, dan terintegrasi penuh dengan perekonomian global. Untuk mencapai semua itu perlu koordinasi dari semua bidang yang tergabung dalam *AEC Council*, yaitu Dewan yang mengkoordinasi sektor ekonomi kementerian meliputi perdagangan, pertanian, kehutanan, telekomunikasi, dan lain-lain. Masalah ketahanan pangan Indonesia di bawah kewenangan Menteri Pertanian saat ini merupakan salah satu masalah pokok yang akan menyiapkan Indonesia untuk maju di komunitas tersebut. Pangan akan menentukan sumber daya manusia dan masalah turunannya yang menjadi tantangan Indonesia menghadapi AEC 2015.

Pangan memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan hidup manusia. Kurangnya ketersediaan pangan akan membuat bencana kelaparan, penyakit dan menurunnya kesejahteraan hidup. Menjadi tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pangan karena salah satu tujuan Negara adalah mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Dengan demikian ada tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pangan yang dibutuhkan dan menjamin keberlanjutannya. Seiring dengan itu diperlukan kesiapan dalam mewujudkan ketahanan pangan (*food security*), kemandirian pangan (*food self-help*) dan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) paling tidak dalam skala nasional.

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (Mujib 2011). Sebagaimana yang disebutkan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam Deklarasi HAM Universal (Universal Declaration of Human Right) tahun 1948, serta UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis bagi Indonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi dan politik.

Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya *Conference of Food and Agriculture* tahun 1943 yang mencanangkan konsep *secure, adequate and suitable supply of food for everyone*. Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) dalam Hanani

(2009) yakni "akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (secure access at all times to sufficient food for a healthy life).

Menurut Kuncoro (2009) ketahanan pangan merupakan faktor penting untuk pembangunan sebuah negara. Ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, antara lain akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak yang paling asasi bagi manusia, pangan memiliki peranan yang penting dalam pembentukan sumberdaya yang berkualitas, dan ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Dengan demikian diperlukan penyesuaian peningkatan produksi disatu pihak. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem, subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut.

"Pada 2003 impor produk pertanian kita di angka US\$3,34 miliar dan selama sepuluh tahun terjadi peningkatan empat kali lipat menjadi US\$14,9 miliar pada tahun lalu," (<http://suarajakarta.co>/2015)

Dari data Badan Pusat Statistik dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah impor produk-produk pertanian lebih dari empat kali lipat sepanjang 2003 hingga 2014. Beberapa penyebab yang membuat kondisi ini terjadi adalah karena jumlah lahan pertanian yang semakin sempit karena terjadi pembangunan yang masif di hampir semua wilayah di Indonesia.

Penyebab lain adalah harga komoditas lokal kita masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan produk impor karena subsidi yang diberikan pemerintah untuk sektor pertanian ini belum menjadi prioritas dan jumlahnya terbatas. Jelas hal ini membuat pasar lebih memilih komoditas impor yang lebih murah meski kualitasnya jauh di bawah produk pertanian lokal.

Jika permasalahan-permasalahan ini tidak diselesaikan segera, maka pertanian Indonesia akan semakin terpuruk. Kemudahan akses dan rendahnya biaya masuk ke negara-negara lain termasuk Indonesia akan menjadi celah bagi negara-negara lain menguasai industri pertanian di Indonesia. Harus ada langkah yang cepat dan efektif dari pemerintah agar kemungkinan-kemungkinan yang akan sangat merugikan bangsa Indonesia ini tidak terjadi.

Pemerintah sebaiknya memperketat prosedur dan izin mendirikan bangunan bagi perusahaan atau pihak-pihak lain yang mengganggu keberlangsungan pertanian Indonesia. Harus ada pembatasan-pembatasan pembangunan agar jumlah lahan tidak semakin berkurang dan tergusur oleh bangunan-bangunan komersial. Selain itu, subsidi yang diberikan pemerintah kepada para petani lokal harus ditingkatkan, agar tidak hanya kuantitas produk pertanian lokal yang bertambah, tetapi juga kualitas dan harga dari komoditas ini bisa bersaing dengan produk impor.

Selain itu perlu adanya kebijakan pemerintah yang lebih memudahkan kalangan pelaku usaha dengan cara mendorong perdagangan yang antara lain dengan pemberian subsidi atau bantuan finansial bagi produsen domestik dalam bentuk pembayaran tunai, pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak, atau bentuk lainnya. Bertujuan membantu perusahaan-perusahaan domestik mengimbangi pesaing internasional.

Referensi

- Hanani. N. 2009, "Pengertian Ketahanan Pangan" <http://nuhfil.lecture.ub.ac.id/files/2009/03/2-pengertian-ketahanan-pangan-2.pdf> Diakses 28 Januari 2015
- Kuncoro. M. 2009, *Ekonomika Indonesia : "Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global"*, UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Mujid. T. 2011 "Hak Atas Pangan Sebagai Hak Konstitusional" Bina Desa-Cindebooks Jakarta
- Saifuddin. A. 2015, <http://suarajakarta.co/ekstra/jurnalis-warga/ketahanan-pangan-sebagai-senjata-menghadapi-mea-tahun-ini/>
- Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan -yang sudah direvisi menjadi UU Nomor 18 tahun 2012